

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Buni, N. L., Sangadji, M., Aini, K., Aini, S. N., Aisyah, H., Parianom, R., ... & da Costa Magno, J. (2025) *BUKU KEMISKINAN DAN KETIDAKSETARAAN*. Bandung: Penerbit Widina Media Utama.
- Haris, S. (2004). *Desentralisasi dan otonomi daerah: desentralisasi, demokratisasi & akuntabilitas pemerintahan daerah*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Jamaluddin, Y., Nizhamul, N., & Pasha, S. (2025). *Birokrasi dan Governansi Publik*. Purbalingga: CV Eureka Media Aksara.
- Lexy J. Moleong. (2016) *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: IKIF Jakarta.
- Lipsky, M. (2010). *Street-Level Bureaucracy: Dilemmas of the Individual in Public Services*. New York: Russell Sage Foundation.
- Nashar, A. (2026). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN GOOD GOVERNANCE: Dinamika Aparatur Pemerintah*. Penerbit KBM Indonesia.
- Sawir. (2020) *Birokrasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Setiawan, I. (2014). *Rekonstruksi birokrasi pemerintahan daerah*. irfan setiawan. Yogyakarta: IPDN.
- Sudrajat, T. (2022). *Hukum birokrasi pemerintah: Kewenangan dan jabatan*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Weber, M. (2019). *Economy and Society: A New Translation* (K. Tribe, Ed. & Trans.). London: Harvard University Press.

Internet:

- Statistik.jabar.go.id. (2025) Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat.
<https://statistik.jabarprov.go.id/dashboard/kemiskinan.com>
- Statistik.tasikmalayakota.bps.go.id. (2025) Badan Pusat Statistik Kota Tasikmalaya.
<https://tasikmalayakota.bps.go.id/id/pressrelease/2025/11/05/3308/poverty-profile.html>

Jurnal:

- Adon, M. J., Jeraman, G. T., & Andrianto, Y. (2023). Kontribusi teori kemiskinan sebagai deprivasi kapabilitas dari amartya sen dalam upaya pemberdayaan masyarakat miskin. *Masyarakat Madani: Jurnal Kajian Islam dan Pengembangan Masyarakat*, 8(1), 1-20.
- Akhdan, T. M., & Setiawan, A. (2026). Dinamika Birokrasi, Data, dan Akses: Problematika Penyaluran Bantuan Sosial di Kabupaten Malang (2024–2025). *Journal of Governance and Policy*, 6(1), 11-25.
- Ali, M., Luthfi, M. K., Mustopa, M., Oiwobo, M. F., & Nasor, M. (2023). Pendekatan Max Weber: Birokrasi serta Struktur Kekuasaan dalam Organisasi Pendidikan Modern. *Jurnal Cahaya Mandalika ISSN*, 2721-4796.
- Amroni, R. Z., & Simbolon, H. (2025). *PELAKSANAAN FUNGSI DINAS SOSIAL DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN JENEPONTO PROVINSI SULAWESI SELATAN* (Doctoral dissertation, IPDN).
- Ana, Khaerul, Safitri, Y. (2025). Pemanfaatan Big Data dalam Peningkatan Pelayanan Publik: Systematic Literature Review. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(2), 5113-5117.
- Ardiansyah, F., Alwi, A., & Susanti, G. (2024). Discretionary analysis on the role of street level bureaucracy in food policy implementation for the poor in Bone District. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 14(1).
- Ariansyah, D., Sagita, M., Julia, R. A., & Sarmila, S. (2025). Analisis Faktor Penyebab Ketidakmerataan Penyaluran Bansos kepada Masyarakat Miskin. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(10).
- Assyakurrohim, D., Ikhrum, D., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2022). Metode studi kasus dalam penelitian kualitatif. *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer*, 3(01), 1-9.
- Athaya Zulfa Zein, Y. (2026). TRANSFORMASI SISTEM PENDATAAN SOSIAL PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA.

- Badriah, L. S. (2019). Ketimpangan distribusi pendapatan kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan serta faktor–faktor yang mempengaruhinya. *Sustainable Competitive Advantage (SCA*, 9, 232-248.
- Fauzia, M. E., & Purnawati, L. (2025). Negara Kesejahteraan dan Politik Pemenuhan Hak Sosial: Analisis Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kabupaten Tulungagung. *Journal of Politics and Policy*, 7(2), 137-160.
- Hariawan, R., Haromain, H., Rohiyatun, B., Najwa, L. L., & Suhardi, M. (2025). Peningkatan Kompetensi Metodologi Kualitatif: Pelatihan Terpadu Manajemen Penelitian, Analisis Data, dan Triangulas. *Jurnal Dedikasi Madani*, 4(2), 93-103.
- Hartina, Y. (2022). *Perilaku Birokrat Dalam Implementasi Program Keluarga Harapan DiKecamatan Tallo Kota Makassar* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Hasan, R. (2024). Dinamika Konsep Welfare State di Indonesia: Antara Janji Konstitusi dan Kenyataan Ekonomi. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(10).
- Hasanah, H., & Observasi, T. T. (2016). Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial. *Jurnal at-Taqaddum*, 8, 1-46.
- Herlambang, A. B., & Wicaksono, I. (2025). EVALUASI KEBIJAKAN BANTUAN SOSIAL DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN SLAWU, KABUPATEN JEMBER. *Interelasi Humaniora*, 1(4), 264-275.
- Hiplunudin, A. (2025). *Kebijakan, birokrasi, dan pelayanan publik: tinjauan kritis ilmu administrasi negara*. Penerbit Andi.
- Huda, R. A., Puspita, R. A., Hasanah, S. N., & Malik, A. (2024). Peran Kebijakan Fiskal Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Di Indonesia Sebagai Negara Berkembang. *Kalianda Halok Gagas*, 7(2), 189-201.
- Hutapea, W. (2022). *AKUNTABILITAS DALAM KEBIJAKAN PUBLIK (STUDI KASUS PADA IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGENTASAN KEMISKINAN DI KABUPATEN MERAUKE) AKUNTABILITAS DALAM KEBIJAKAN PUBLIK (STUDI KASUS PADA IMPLEMENTASI*

- KEBIJAKAN PENGENTASAN KEMISKINAN DI KABUPATEN MERAUKE*) (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Iswahyudi, I., & Asnawi, N. (2024). Menuju kebijakan sosial berorientasi kapabilitas: Telaah pemikiran Amartya Sen dan Martha Nussbaum. *Multikultura*, 3(4), 4.
- Kadir, A. (2015). Prinsip-Prinsip Dasar Rasionalisasi Birokrasi Max Weber Pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara. *JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik)*, 1(1), 40-54.
- Kadarisman, M. (2021). Dinamika Politik Dalam Reformasi Administrasi Publik. *Kajian Ilmu Sosial (KAIS)*, 2(1), 141-157.
- Kholifah, E. (2013). Pemikiran kritis tentang Bureaucrat street-level theory oleh Michael Lipsky. *Relasi: Jurnal Ekonomi*, 18.
- Kusumadewi, N. M. A., Hariz, M., & Yasin, M. (2024). Analisis penyebab, konsekuensi dan solusi potret kemiskinan di Indonesia pasca era reformasi. *Trending: Jurnal Manajemen dan Ekonomi*, 2(3), 27-37.
- Kusumah, F. A., Cokro, M., Salsabila, N., Harywibowo, R., & Aji, M. P. (2024). Analisis Tipe Ideal Birokrasi Dengan Konsep Birokrasi Weber Di Kantor Walikota Jakarta Utara. *Jurnal Madani*, 2(4), 82-90.
- Lailiyah, I., Wulandari, R., & Anam, M. S. (2025). Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Kemiskinan di Kabupaten Jember. *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(3), 683-690.
- Madani, M., Iva, M. I. N., & Amiruddin, I. (2021). Peran street level bureaucracy dalam implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kota Makassar. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, 7(3), 333-343.
- Mahasatya, M., & Baidhowah, A. R. (2025). *COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM MENGATASI KEMISKINAN MELALUI BANTUAN SOSIAL DI KECAMATAN SAKO KOTA PALEMBANG PROVINSI SUMATERA SELATAN* (Doctoral dissertation, Institut Pemerintahan Dalam Negeri).

- MALIKI, F. N. (2021). *DISKRESI STREET LEVEL BUREAUCRATS DALAM IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KECAMATAN BONTOA KABUPATEN MAROS* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Michele, V. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Fakir Miskin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin. *LEX PRIVATUM*, 8(3).
- Mohamad, M. S. S. (2025). Hak dan Kewajiban warga negara dalam negara hukum: Dilema implementasi dan reformasi hukum di Indonesia. *Judge: Jurnal Hukum*, 6(03), 699-711.
- Puspaningtyas, A., Hariyoko, Y., & Widodo, D. (2025). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN “UNIVERSAL HEALTH COVERAGE” MENGGUNAKAN PENDEKATAN STREET LEVEL BUREAUCRACY DI KABUPATEN GRESIK. *PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e-ISSN: 2797-0469)*, 5(02), 12-20.
- Putri, S. A., Triono, A., & Kasmawati, K. (2025). Diskresi pejabat administrasi dalam pelayanan publik terhadap batasan dan pengawasan diskresi. *Lex Stricta: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 33-42.
- Rachmawati, I. (2007). Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif: wawancara. *Jurnal Keperawatan Indonesia*.
- Rakhmat, R., & Fakhri, F. (2019). Dinamika Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK)*, 1(2), 33-38.
- Rivani, E. (2016). Peran Sumber Data Tunggal dalam Mendukung Ketepatan Sasaran Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. *Kajian*, 21(2), 87-103.
- Rusfiana, Y., & Supriyatna, C. (2021). Memahami Birokrasi Pemerintahan dan Perkembangannya.
- Salim, K. (2023). Kompleksitas dan dinamika birokrasi di Indonesia.

- Saragih, J. (2024). Evaluasi Efektivitas Kebijakan Bantuan Sosial Pemerintah dalam Mengatasi Kemiskinan. *Cakrawala Repositori IMWI*, 7(3), 1175-1185.
- Siregar, R. A. (2024). *Implementasi Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang penyaluran bantuan sosial secara non tunai (studi di Kelurahan Sipolu-Polu Kabupaten Mandailing Natal)* (Doctoral dissertation, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan).
- Suci, S. (2024). *PERAN DINAS SOSIAL DI KABUPATEN LUWU UTARA DALAM PENANGANAN FAKIR MISKIN BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2011* (Doctoral dissertation, IAIN Palopo).
- Sukmana, O. (2016). Konsep dan desain negara kesejahteraan (welfare state). *Jurnal Sosial Politik*.
- Sulaeman, A., & Ip, S. (2025). Prinsip-Prinsip Demokrasi Dan Good Governance. *Pengantar Ilmu Pemerintahan: Konsep, Sistem Dan Praktik*, 35.
- Sulila, I. (2015). *Implementasi dimensi layanan publik dalam konteks otonomi daerah*. Deepublish.
- SURYANTO, S. (2011). *INTERNALISASI MODAL SOSIAL SEBAGAI STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN (STUDI KASUS DI KELURAHAN BARA-BARAYA UTARA KECAMATAN MAKASSAR KOTA MAKASSAR)* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Susmita, S. (2020). *Tinjauan Yuridis Terhadap Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan Di Kelurahan Terawas Kabupaten Musi Rawas* (Doctoral dissertation, IAIN BENGKULU).
- Syam, A. B., Hidayat, N., & Aulia, N. (2025). Efektivitas Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Nex Generation (Siks-Ng) Online Epada Dinas Sosial Kabupaten Sinjai. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 22(2), 212-221.
- Tania, N. E., Puspita, D., Sari, A. K., Febriana, A. N. A., & Sari, F. N. (2025). RELEVANSI BIROKRASI WEBERIAN TERHADAP PENGUATAN

- TATA KELOLA PEMERINTAHAN DI INDONESIA. *PARADIGMA: Jurnal Ilmu Administrasi*, 14(2), 192-204.
- Thahir, B. (2019). Kebijakan sosial dan otonomi daerah. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 2(2), 91-102.
- Tummers, L., & Bekkers, V. (2014). Policy implementation, street-level bureaucracy, and the importance of discretion. *Public management review*, 16(4), 527-547.
- Wicaksono, I., & Aji, M. P. (2025). Weber's Ideal Bureaucracy Implementation in the Secretariat Bureau of Headship at the Secretariat General of the Regional Representative Council. *Administratio*, 16(1), 69-84.
- Widya. (2025). Data Tunggal Sosial Ekonomi, Penurunan Kemiskinan dan Pembangunan Berkelanjutan: PENGALAMAN INDONESIA, 3(1), 91-107.
- Widyaningsih, D., & Toyamah, N. (2022). *Mendorong Pemutakhiran Berkelanjutan terhadap Data Terpadu Kesejahteraan Sosial* (No. 2646).
- Wijayanti, C. D., Soegianto, S., Sudarmanto, K., & Arifin, Z. (2025). Implementasi Bantuan Sosial Berbasis DTKS untuk Akurasi Penerima di Kota Semarang: Implementing DTKS-Based Social Assistance for Accurate Beneficiary Targeting in Semarang City. *Journal Juridisch*, 3(3), 221-235.
- Yod, Y., Teturan, Y. E., & Lekatompessy, R. L. (2025). Paradoks Perlindungan Sosial: Analisis Kesenjangan antara Kebijakan dan Praktik Penyaluran Bantuan Sosial di Kabupaten Merauke. *Musamus Journal of Public Administration*, 8(1), 110-118.
- Yusra, Z., Zulkarnain, R., & Sofino, S. (2021). Pengelolaan Lkp Pada Masa Pandemi Covid-19. *Journal Of Lifelong Learning*, 4(1), 15-22.